

307.3364
SET
a 0.1



LAPORAN PENELITIAN

ASPIRASI PENGGUNAAN LEMBAGA KEUANGAN BALAI USAHA MANDIRI TERPADU (BMT) OLEH MASYARAKAT NELAYAN DI PANTAI PEKALONGAN

Oleh :

Rofah Setyowati, SH.,MH

Suradi, SH.,MS

Diah Wijaningsih, SH

Dibiayai Dengan Dana DIK Rutin Universitas Diponegoro, Sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Tanggal, 10 April 2000 Nomor : 121/J07/PJJ/KP/2000

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
SEPTEMBER, 2000

RINGKASAN

Selain dikenal dengan sebutan sebagai "Kota Santri", Pekalongan juga merupakan kota penghasil tangkapan ikan yang bisa diandalkan untuk tingkat Jawa Tengah. Kaitan antara kedua sebutan tersebut, mendasari pemikiran untuk dilakukannya kajian lebih lanjut tentang aspirasi masyarakat nelayan di pantai Pekalongan terhadap lembaga keuangan, khususnya Balai Usaha Mandiri Terpadu (Baitul Maal Wattamwil).

Penelitian ini bersifat *diskriptif analistis* disertai dengan pendekatan *socio legal research*.

Aspirasi masyarakat nelayan terhadap BMT dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : motivasi, persepsi dan sikap. Motivasi masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan dana pembiayaan. Motivasi ini juga dipengaruhi beberapa faktor penunjang, terutama bahwa BMT sesuai dengan syari'ah Islam. Terbatasnya pemahaman tentang BMT sesuai dengan kondisi tingkat pendidikan mereka yang rata-rata rendah. Kurangnya sosialisasi tentang BMT, menjadi salah satu sebab sikap mereka tidak memanfaatkan BMT selain kondisi masyarakat nelayan sendiri.

Dengan demikian supaya bisa memenuhi aspirasi masyarakat nelayan, khususnya dalam hal pembiayaan awal, BMT perlu membuat format khusus, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat nelayan, khususnya di Pantai Pekalongan.

Kata Pengantar

Segenap puji dan sepenuh syukur, kami hadapkan kehadlirat Allah swt yang telah mencurahkan bimbingan dan melempangkan taufiq-Nya, hingga penulis dapat menyajikan Laporan Penelitian ini.

Penelitian dengan judul : **Aspirasi Penggunaan Lembaga Keuangan Balai-Usaha Mandiri Terpadu (BMT) oleh Masyarakat Nelayan di Pantai Pekalongan** terinspirasi oleh penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya di lokasi yang sama namun dengan fokus penelitian mengenai peranan BMT-nya. Pengambilan fokus pada aspirasi masyarakatnya dalam penelitian ini didasarkan pada sebuah asumsi bahwa ada hubungan antara kondisi spiritualitas masyarakat dengan lembaga (keuangan) dalam memenuhi kebutuhan usahanya.

Sejak persiapan hingga akhir penyusunan Laporan Penelitian ini, ada banyak pihak yang telah membantu. Berkaitan dengan hal tersebut rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam penulis tujukan kepada : Ketua Lemlit UNDIP, Dekan Fakultas Hukum, dan Bapak Yasin Tasyrif. Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada Camat Wiradesa; Kepala Desa Wonokerto Kulon; Kepala Desa Bebel; Ketua Yayasan Kota Santri, Direktur BMT Kota Santri beserta Staf; Direktur BMT An Najah. Kepada mereka yang telah ikut membantu dalam peneliltian ini, hanya kepada Allahlah penulis berharap untuk memberikan balasan yang lebih baik.

Kesadaran akan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian hingga penyajian laporan, diikuti dengan kesiapan menerima kritik serta saran. Oleh karena itu, rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada para pemerhati yang berkenan member masukan guna perbaikan penelitian kami. Meskipun masih sangat sederhana, mudah-mudahan apa yang tertuang dalam Laporan Penelitian ini membawa manfaat, khususnya bagi peminat bidang Hukum Ekonomi Islam.

Semarang, Oktober 2000

Ketua Peneliti

Ro;fah Setyowati

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1. A. LATAR BELAKANG 1
- B. PEMBatasan MASALAH 5
- C. PERUMUSAN MASALAH 5

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. PENGERTIAN ASPIRASI 6
- B. PENGERTIAN BMT 7
- C. PRINSIP DASAR OPERASIONAL : BEBAS BUNGA 9

BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

- A. TUJUAN PENELITIAN 12
- B. MANFAAT PENELITIAN 12

BA IV : METODE PENELITIAN

- A. PENDEKATAN PENELITIAN 15
- B. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 15
- C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 16

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. KEADAAN UMUM DAERAH PENELITIAN 18
- B. GAMBARAN UMUM KEHIDUPAN NELAYAN
DI KECAMATAN WIRADESA 19
 1. Kehidupan Sosial 23
 2. Kehidupan keagamaan 24
 3. Kondisi Ekonomi 27
- C. BMT YANG MEMPUNYAI NASABAH NELAYAN 30
 1. BMT An Najah 30
 2. BMT Kota Santri 33
- D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ASPIRASI
MASYARAKAT NELAYAN TERHADAP BMT 34
 1. Motivasi Masyarakat Nelayan Terhadap BMT 35
 2. Aspirasi Masyarakat Nelayan Terhadap BMT 39
 3. Sikap Masyarakat Nelayan Terhadap BMT 41

BAB VI : PENUTUP

- A. KESIMPULAN 44
- B. SARAN 45

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Usaha nelayan diwilayah pantai Pekalongan sebagian besar merupakan sektor informal dan tradisional. Salah satu kendala utama dalam pengembangannya yaitu pada terbatasnya modal usaha. Berkaitan dengan masalah ini, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, berupa bantuan pendanaan dalam bentuk Kredit Investasi Kecil (KIK), kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) melalui Lembaga keuangan Bank Rakyat Indonesia. Disamping itu, di tingkat daerah masih ada lembaga keuangan lain baik dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat ataupun Badak Kredit Kecamatan (BKK). Persyaratan yang diminta untuk keperluan pengajuan pinjaman tersebut sudah diupayakan agar tidak memberatkan para pengusaha mikro kecil, namun demikian baru sebagian kecil yang bisa terlayani dari keseluruhan kebutuhan dana.

Disisi lain, untuk pembiayaan pembangunan diperlukan kemampuan untuk memobilisasi dana masyarakat yang ada. Oleh karena itu seluruh potensi masyarakat, termasuk masyarakat nelayan perlu dioptimalkan dengan berbagai upaya.

Menurut Sidik P, pola pembinaan usaha kecil, lapisan pengusaha mikro kecil termasuk sektor informal dan tradisional, dibina melalui

pendekatan kelompok, baik dalam bentuk kelompok usaha bersama atau dalam bentuk wadah koperasi . (Sidik P.1994, h.8)

Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan landasan sistem perekonomian Indonesia yang tertuang dalam pasal 33 Undang-undang Dasar No. 1945 diketahui bahwa koperasi merupakan salah satu kekuatan dasar ekonomi selain sektor negara dan swasta (Sagimun MD, 1988, h.8). Untuk menunjang berkembangnya sektor koperasi dalam mewujudkan demokrasi sekonomi yang berdasar atas asas kekeluargaan, koperasi sebagai kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh yang berakar dalam masyarakat.

Dilihat dar jenis usaha koperasi, ada dua macam, yaitu koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha yang melaksanakan unit simpan pinjam. Dengan demikian berarti salah satu kegiatan utama koperasi ialah membantu mengatasi kesulitan ekonomi atau keuangan para anggota guna membiayai usahanya.

Kopersi yang melaksanakan usaha simpan pinjam pada umumnya memberikan imbalan berdasarkan bunga yang ditentukan pada waktu akad tanpa memperhitungkan untung rugi dari pemanfaat dana. Besarnya prosentase bunga didasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan atau ditempatkan. Hal ini berlaku juga untuk pinjaman dana, sehingga pembayaran bunga tetap seperti yang diperjanjikan

tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.

Sejak digulirkannya Pakto 1988 oleh pemerintah, lembaga keuangan di Indonesia mempunyai sistem alternatif yang tumbuh dan berkembang dengan cukup pesat, yakni sistem bagi hasil atau sistem syaria'ah. Salah satu kelanjutan dari berkembangnya sistem tersebut dalam masyarakat, pada bulan Desember 1996 telah dicanangkan suatu gerakan nasional Balai-usaha Mandiri Terpadu (untuk selanjutnya disingkat dengan BMT yang juga merupakan singkatan dari Baitul maal wattamwil). Gerakan tersebut merupakan suatu program yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, khususnya para pengusaha kecil bawah. Hingga saat ini sudah ribuan BMT beroperasi hampir disetiap kota besar dan tersebar diseluruh propinsi di Indonesia.

Selain berbentuk badan hukum koperasi, sebagian BMT masih berupa KSM (Kelompok Swadaya masyarakat). Untuk bentuk terakhir berada dibawah pembinaan beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) seperti Dompok Dhuafa Republika, PINBUK (Pusat Inkubasi Pengusaha Kecil) dan P3UK (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil) (Republika, 6 Des, 1996).

Kota Pekalongan merupakan kota penghasil tangkapan ikan yang sangat diandalkan untuk tingkat Jawa Tengah. Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syaria'ah, masyarakat Pekalongan

yang juga dikenal sebagai warga "Kota Santri" menunjukkan minat yang menggemirakan akan hadirnya lembaga keuangan syari'ah. Hal ini terbukti dengan telah beroperasinya beberapa bank syari'ah, yaitu BNI 46 Syari'ah dan Bank Mandiri Syari'ah.

Khusus bagi masyarakat kecil bawah, kebutuhan bantuan keuangan dengan sistem syari'ah, lebih banyak dilayani oleh BMT. Suatu penelitian yang dilakukan terhadap usaha nelayan di wilayah pantai Pekalongan menemukan kecenderungan menggunakan jasa BMT, meskipun persepsi masyarakat tentang BMT itu sendiri masih cukup beragam. (Suradi, 1997, h. 5).

Untuk itu, perlu dikaji lebih jauh tentang berbagai faktor yang mempengaruhi aspirasi mereka dalam memilih BMT sebagai wadah yang mendukung perkembangan usahanya. Dengan demikian diharapkan dapat ditemukan berbagai langkah yang tepat dalam upaya pembinaan dan pengembangan BMT itu sendiri. Dengan mobilitas dana dari masyarakat sebagaimana diharapkan oleh Pemerintah bisa semakin baik, dan kesejahteraan masyarakat nelayan yang bersangkutan juga meningkat.

B. PEMBATASAN MASALAH

Sebagaimana telah diuraikan pada paparan mengenai latar belakang di atas, maka penelitian ini hanya akan difokuskan bagaimana aspirasi masyarakat nelayan terhadap penggunaan lembaga keuangan BMT. Aspirasi tersebut juga dibatasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memanfaatkan BMT antara lain meliputi : persepsi, kebutuhan, dan motivasi.

C. PERUMUSAN MASALAH

Dari paparan diatas, beberapa hal yang akan dicoba disoroti dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat nelayan terhadap BMT ?
2. Motif apa yang merangsang masyarakat nelayan menggunakan BMT ?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat nelayan cenderung menggunakan jasa BMT untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usahanya ?

Semua bahasan dan analisa permasalahan diatas dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan komprehensif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspirai masyarakat nelayan dan operasional BMT di wilayah pantai Pekalongan.